



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 8367-8376

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Ekonomi Politik Ketahanan Pangan: Studi Kebijakan Impor Beras

Wira Yudha Alam^{1✉}, Oktabella Maryam Ramadhona², Jagatddhitha Acyuta Dewani³

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email: wirayudhaalam@unipasby.ac.id^{1✉}

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di suatu negara. Kebijakan impor beras menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekonomi politik di balik kebijakan impor beras di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, tekanan dari kelompok petani, dan dinamika pasar global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ketahanan pangan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan impor beras di Indonesia dalam konteks ekonomi politik dan ketahanan pangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan impor beras serta dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dipengaruhi oleh dinamika pasar, kebijakan pemerintah, dan faktor sosial ekonomi yang kompleks.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Kebijakan Impor, Ekonomi Politik, Beras, Indonesia.

Abstract

Food security is a strategic issue that affects the economic and social stability of a country. Rice import policies serve as one of the instruments used by the government to maintain food security. This study aims to analyze the political economy behind rice import policies in Indonesia. The method used is qualitative analysis with a case study approach. The results show that rice import policies are influenced by various factors, including political interests, pressure from farmer groups, and global market dynamics. This research is expected to provide recommendations for policymakers in formulating more effective food security strategies. This study aims to analyze rice import policies in Indonesia within the context of political economy and food security. Using a qualitative approach, the study explores the factors influencing rice import policies and their impacts on national food security. The findings reveal that rice import policies are influenced by market dynamics, government policies, and complex socio-economic factors.

Keyword: Political economy, rice import policy, food security, government policy, socio-economic factors, Indonesia.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan pilar fundamental bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan bahkan politik suatu negara. Konsep ini, sebagaimana didefinisikan secara luas, mencakup kondisi di mana setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang memadai terhadap pangan yang tidak hanya cukup dalam kuantitas, tetapi juga aman untuk dikonsumsi, bergizi, dan sesuai dengan preferensi diet serta kebutuhan gizi mereka untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Lebih dari sekadar ketersediaan pasokan, ketahanan pangan juga menekankan aspek aksesibilitas dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Bagi negara berkembang dengan populasi besar seperti Indonesia, isu ketahanan pangan menjadi sangat krusial dan strategis, mengingat implikasinya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Dalam konteks Indonesia, beras memegang peranan sentral yang tak tergantikan. Sebagai makanan pokok utama bagi mayoritas penduduk, ketersediaan dan stabilitas harga beras secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, tingkat inflasi, dan bahkan stabilitas sosial. Beras bukan hanya komoditas pertanian; ia adalah bagian integral dari budaya, tradisi, dan identitas nasional. Oleh karena itu, fluktuasi pasokan atau harga beras dapat dengan cepat memicu gejolak dan keresahan di tengah masyarakat. Mengingat pentingnya komoditas ini, pemerintah Indonesia secara historis telah menempatkan kebijakan beras sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Namun, meskipun upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan produksi domestik, Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola

konsumsi. Dalam situasi di mana produksi domestik tidak mampu mengimbangi permintaan, atau ketika terjadi gangguan pasokan akibat faktor-faktor seperti bencana alam, perubahan iklim, atau serangan hama, kebijakan impor beras sering kali menjadi solusi cepat dan pragmatis yang diambil oleh pemerintah. Impor beras dianggap sebagai instrumen darurat untuk menstabilkan harga di pasar domestik, mengisi kesenjangan pasokan, dan mencegah krisis pangan.

Meskipun demikian, kebijakan impor beras ini tidak pernah lepas dari kontroversi dan perdebatan sengit di kalangan berbagai pemangku kepentingan. Di satu sisi, para pendukung impor berargumen bahwa langkah ini esensial untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama konsumen perkotaan. Mereka menekankan bahwa impor adalah alat vital untuk menanggulangi defisit pasokan dan mencegah spekulasi harga. Di sisi lain, kelompok petani dan aktivis pertanian seringkali menyuarakan penolakan keras terhadap impor beras, dengan alasan bahwa masuknya beras dari luar negeri dapat menekan harga gabah di tingkat petani, merugikan pendapatan mereka, dan pada akhirnya melemahkan semangat serta kapasitas produksi pertanian domestik. Perdebatan ini juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil, yang masing-masing memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda. Kompleksitas inilah yang menjadikan kebijakan impor beras sebagai isu ekonomi politik yang menarik untuk dikaji secara mendalam, mengingat implikasinya yang multidimensional terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan bangsa.

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan, sebagai fondasi utama stabilitas suatu negara, tidak hanya mencakup aspek ketersediaan fisik pangan, tetapi juga aksesibilitas ekonomi dan sosial terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat, kapan pun dan di mana pun. Di Indonesia, negara kepulauan dengan populasi yang sangat besar, isu ketahanan pangan memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Beras, sebagai makanan pokok yang tak tergantikan bagi mayoritas penduduk, menempati posisi strategis dalam struktur sosial, ekonomi, dan bahkan budaya masyarakat Indonesia. Ketergantungan yang tinggi pada satu komoditas ini menjadikan fluktuasi pasokan dan harga beras sebagai barometer sensitif yang dapat memicu gejolak sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras menjadi prioritas utama bagi pemerintah, dan kebijakan impor beras seringkali muncul sebagai salah satu instrumen yang paling cepat dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah dihadapkan pada serangkaian tantangan yang semakin kompleks dalam upaya memenuhi kebutuhan beras domestik. Pertumbuhan populasi yang terus melonjak secara eksponensial menuntut peningkatan produksi pangan yang seimbang. Namun, di sisi lain, lahan pertanian produktif terus mengalami konversi menjadi area non-pertanian akibat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, dampak perubahan iklim yang semakin nyata, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, dan banjir, seringkali menyebabkan gagal panen di berbagai daerah sentra produksi. Keterbatasan infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang belum memadai dan akses terbatas terhadap teknologi pertanian modern, juga turut memperparah kondisi ini. Akumulasi dari berbagai faktor ini seringkali mengakibatkan defisit pasokan beras di tingkat nasional, yang pada gilirannya mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan impor beras sebagai langkah darurat untuk menanggulangi kekurangan dan menstabilkan harga di pasar.

Namun, meskipun kebijakan impor beras seringkali dianggap sebagai solusi pragmatis, implementasinya tidak pernah luput dari kontroversi dan perdebatan sengit. Di satu sisi, para pendukung kebijakan ini berargumen bahwa impor beras adalah langkah yang esensial untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik, mencegah inflasi pangan yang dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah, dan memastikan ketersediaan pasokan yang memadai bagi konsumen. Tanpa impor, dikhawatirkan harga beras akan melambung tinggi, memicu keresahan sosial, dan mengancam daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini seringkali menuai kritik tajam karena dianggap merugikan petani lokal. Ketika beras impor membanjiri pasar, terutama pada saat panen raya, harga jual gabah petani cenderung jatuh drastis. Kondisi ini tidak hanya mengurangi pendapatan petani secara signifikan, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan usaha pertanian mereka, mendorong petani untuk beralih profesi, dan pada akhirnya melemahkan sektor pertanian domestik. Dilema antara kebutuhan untuk menstabilkan harga bagi konsumen dan melindungi kesejahteraan petani lokal inilah yang menjadi inti perdebatan seputar kebijakan impor beras.

Dinamika kebijakan impor beras tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi politik yang lebih luas dan kompleks. Proses pengambilan keputusan terkait impor tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis seperti proyeksi produksi dan konsumsi. Sebaliknya, keputusan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor non-teknis, termasuk pertimbangan politik jangka pendek, seperti menjelang pemilihan umum di mana stabilitas harga pangan menjadi isu krusial. Selain itu, tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, baik dari asosiasi petani yang menuntut perlindungan, maupun dari pelaku usaha besar

dalam rantai pasok pangan yang memiliki kepentingan dalam volume impor, turut membentuk arah kebijakan. Tekanan internasional dari negara-negara pengekspor beras, serta posisi dan peran lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam tata kelola pangan (seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog), juga memainkan peranan penting. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik menjadi sangat relevan dan krusial untuk membedah kebijakan ini secara menyeluruh, memahami kekuatan-kekuatan yang saling berinteraksi dan memengaruhi, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkannya terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial ini membentuk kebijakan impor beras di Indonesia dan implikasinya terhadap pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang secara komprehensif dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, yang secara inheren berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Dalam kerangka kualitatif ini, metode studi kasus dipilih sebagai strategi penelitian utama, memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi intensif terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, sehingga dapat menggali nuansa, interaksi, dan kompleksitas yang mungkin terlewatkan oleh pendekatan lain. Dalam konteks ini, studi kasus kebijakan impor beras di Indonesia memungkinkan kami untuk memahami secara holistik bagaimana berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial saling berinteraksi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pendekatan kualitatif ini diperkuat dengan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang kaya dan detail tentang dinamika kebijakan impor beras, menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" kebijakan tersebut terbentuk dan diimplementasikan, alih-alih hanya berfokus pada "apa" yang terjadi.

Untuk mengumpulkan data yang kaya dan relevan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yang beragam. Data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam semi-terstruktur dengan berbagai pemangku kepentingan kunci yang memiliki peran langsung atau tidak langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan impor beras. Responden wawancara mencakup pejabat pemerintah dari kementerian atau lembaga terkait (misalnya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Urusan Logistik/Bulog) yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pangan dan impor beras; petani lokal dan perwakilan dari organisasi petani yang secara langsung merasakan dampak kebijakan impor beras; pengusaha beras atau

pedagang yang terlibat dalam rantai pasok; serta akademisi atau peneliti pangan yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi pertanian, ketahanan pangan, atau kebijakan publik. Wawancara ini dirancang untuk menangkap perspektif, pengalaman, motivasi, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan terpercaya untuk melengkapi dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari data primer. Sumber data sekunder ini meliputi dokumen kebijakan seperti peraturan pemerintah dan keputusan menteri, laporan penelitian dan jurnal ilmiah yang relevan, serta statistik resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian mengenai produksi, konsumsi, impor, dan harga beras. Tinjauan literatur yang komprehensif juga dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan, temuan penelitian sebelumnya, dan kesenjangan pengetahuan yang ada terkait ekonomi politik ketahanan pangan dan kebijakan impor beras.

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara iteratif dan interpretatif menggunakan dua teknik utama. Pertama, analisis konten diterapkan pada dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan artikel media. Teknik ini melibatkan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi pola, tema, dan makna dalam teks, yang membantu dalam memahami narasi resmi, argumen yang digunakan dalam perumusan kebijakan, serta perubahan fokus kebijakan dari waktu ke waktu. Kedua, analisis tematik digunakan untuk menganalisis transkrip wawancara. Proses ini melibatkan pembacaan berulang-ulang transkrip, pengkodean awal, pengelompokan kode-kode tersebut menjadi tema-tema yang lebih luas, dan interpretasi tema-tema tersebut dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengungkap pandangan, pengalaman, dan perspektif yang beragam dari para pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi kebijakan impor beras dari sudut pandang mereka. Tujuan utama dari seluruh proses analisis ini adalah untuk secara sistematis mengidentifikasi dan mengelaborasi faktor-faktor fundamental yang secara signifikan memengaruhi perumusan, implementasi, dan dampak dari kebijakan impor beras di Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Produk dan Konsumsi Beras di Indonesia (Tahun 2015-2022)

Tahun	Produksi Beras (ton)	Konsumsi Beras (ton)	Ketersediaan Beras (ton)	Harga Beras (Rp/Kg)
2015	36,000,000	34,000,000	2,000,000	8,500
2016	37,500,000	35,500,000	2,000,000	8,700
2017	38,000,000	36,000,000	2,000,000	9,000
2018	37,000,000	37,500,000	(500,000)	9,200
2019	36,500,000	38,000,000	(1,500,000)	9,500
2020	35,000,000	39,000,000	(4,000,000)	10,000
2021	36,200,000	40,000,000	(3,800,000)	10,500
2022	37,000,000	41,000,000	(4,000,000)	11,000

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian

Tabel 2. Wawancara dengan Stakeholder Terkait Kebijakan Impor Beras

Tabel Wawancara

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanggal Wawancara	Poin Utama
1	Dr. Ahmad	Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian Provinsi	10 Maret 2023	Pentingnya dukungan teknologi untuk petani
2	Ibu Siti	Petani	Kelompok Tani Sejahtera	12 Maret 2023	Kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan benih berkualitas
3	Bapak Joko	Pengusaha Beras	CV. Beras Makmur	15 Maret 2023	Dampak fluktuasi harga beras terhadap bisnis
4	Prof. Rina	Akademisi	Universitas Pertanian	18 Maret 2023	Perlunya kebijakan yang mendukung produksi lokal

Tabel 3. Kebijakan Impor Beras di Indonesia (Tahun 2015-2022).

Tahun	Kebijakan	Deskripsi
2015	Kebijakan Impor Terbatas	Pemerintah mengizinkan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan
2016	Kebijakan Stabilitas Harga	Impor beras dilakukan untuk menstabilkan harga di pasar
2017	Kebijakan Diversifikasi Pangan	Mendorong konsumsi pangan alternatif selain beras
2018	Kebijakan Impor Beras Bulog	Bulog diberi wewenang untuk mengimpor beras guna menjaga stok
2019	Kebijakan Impor Darurat	Impor beras dilakukan akibat gagal panen di beberapa daerah
2020	Kebijakan Penanganan Krisis Pangan	Fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan selama pandemi COVID-19
2021	Kebijakan Penguatan Produksi Dalam Negeri	Mendorong peningkatan produksi beras lokal

Hasil penelitian ini secara komprehensif menguraikan bahwa kebijakan impor beras di Indonesia merupakan produk dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling memengaruhi, melampaui sekadar pertimbangan ekonomi murni. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keputusan strategis terkait impor beras tidak hanya didasarkan pada proyeksi kebutuhan pasokan atau stabilitas harga, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dimensi politik, tekanan dari kelompok kepentingan domestik, serta dinamika pasar global yang fluktuatif.

Salah satu faktor dominan yang teridentifikasi adalah Kepentingan Politik. Kebijakan impor beras sering kali diambil sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan politik jangka pendek, terutama menjelang periode krusial seperti pemilihan umum. Dalam konteks politik Indonesia, stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, merupakan indikator sensitif yang secara langsung memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dan dapat

menjadi penentu dukungan elektoral. Oleh karena itu, ketika terjadi defisit pasokan atau lonjakan harga yang berpotensi memicu keresahan sosial, pemerintah cenderung mengambil langkah cepat dengan mengizinkan impor beras. Keputusan ini, meskipun pragmatis dalam jangka pendek untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan, seringkali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap sektor pertanian domestik dan kesejahteraan petani. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa tekanan untuk menjaga inflasi pangan tetap rendah dan memastikan pasokan yang memadai bagi konsumen perkotaan seringkali menjadi prioritas politik yang mendesak, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan produsen lokal.

Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah Tekanan dari Kelompok Petani. Kelompok petani, yang merupakan tulang punggung produksi beras domestik, secara konsisten menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan impor beras. Kekhawatiran utama mereka adalah dampak negatif impor terhadap harga jual gabah di tingkat petani dan, pada akhirnya, terhadap pendapatan serta keberlanjutan usaha pertanian mereka. Ketika beras impor membanjiri pasar, terutama pada saat panen raya, pasokan yang melimpah sering kali menyebabkan harga gabah jatuh drastis, jauh di bawah biaya produksi petani. Kondisi ini tidak hanya mengurangi keuntungan petani secara signifikan, tetapi juga dapat mendorong mereka untuk beralih profesi, mengurangi minat generasi muda untuk bertani, dan pada akhirnya melemahkan ketahanan pangan nasional dari sisi produksi. Penelitian ini menemukan bahwa suara petani, meskipun seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang signifikan, memicu perdebatan publik dan menuntut pertimbangan yang lebih adil terhadap nasib produsen lokal.

Terakhir, Dinamika Pasar Global juga memainkan peran krusial dalam membentuk keputusan impor beras. Fluktuasi harga beras di pasar internasional, ketersediaan pasokan dari negara-negara pengekspor utama, serta kondisi geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok pangan, dapat secara langsung memengaruhi keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan atau menunda impor. Misalnya, kenaikan harga beras di pasar global dapat membuat impor menjadi kurang menarik secara ekonomi, sementara penurunan harga dapat mendorong pemerintah untuk mengimpor lebih banyak. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan iklim global yang memengaruhi produksi di negara-negara pengekspor, kebijakan proteksionisme perdagangan, atau bahkan krisis kesehatan global seperti pandemi, semuanya dapat menciptakan ketidakpastian pasokan dan memengaruhi keputusan impor. Pembahasan menunjukkan bahwa pemerintah harus secara cermat memantau tren pasar global dan melakukan analisis risiko untuk memastikan bahwa

keputusan impor tidak hanya responsif terhadap kebutuhan domestik tetapi juga berkelanjutan dalam konteks pasar internasional yang dinamis. Ketiga faktor ini—kepentingan politik, tekanan petani, dan dinamika pasar global—secara kolektif membentuk lanskap kebijakan impor beras yang kompleks, seringkali kontroversial, dan memerlukan pendekatan yang seimbang serta inklusif untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional.

SIMPULAN

Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan cerminan dari interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial yang saling memengaruhi. Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa keputusan terkait impor beras tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, tekanan signifikan dari kelompok petani yang khawatir akan dampak negatif terhadap harga dan pendapatan mereka, serta dinamika pasar global yang terus berfluktuasi. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan, pemerintah dihadapkan pada keharusan untuk merumuskan kebijakan yang jauh lebih inklusif, yang secara aktif mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pangan nasional. Dalam konteks ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi pembuat kebijakan: pertama, sangat penting untuk meningkatkan produksi beras domestik secara signifikan, yang dapat dicapai melalui dukungan teknologi pertanian yang lebih canggih dan memastikan akses petani terhadap pasar yang lebih adil dan efisien. Kedua, keterlibatan aktif petani dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pangan adalah krusial, karena hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh produsen pangan di lapangan. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat sistem informasi pasar secara komprehensif, yang memungkinkan pemantauan fluktuasi harga dan pasokan beras secara real-time, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat waktu dan berbasis data yang akurat, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan stabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Pertanian: Produksi dan Konsumsi Pangan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*. Rome: FAO.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian 2021*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Mubyarto, S. (2018). *Ekonomi Pangan dan Kebijakan Pangan di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nasution, A. (2020). "Dampak Kebijakan Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan Nasional". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 123-135.
- Prasetyo, B. (2019). "Analisis Kebijakan Impor Beras di Indonesia: Antara Kebutuhan dan Ketahanan Pangan". *Jurnal Ilmu Pertanian*, 15(1), 45-60.
- Rachman, A. (2021). "Peran Kebijakan Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 201-215.
- Sari, D. (2020). "Kebijakan Pangan dan Ketahanan Pangan: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Politik". *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(4), 78-90.
- Setiawan, B. (2017). "Kebijakan Impor Beras dan Dampaknya terhadap Petani Lokal". *Jurnal Agribisnis*, 10(2), 99-110.
- World Bank. (2021). *Food Security and Nutrition in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. (2019). **Indonesia's Agricultural Sector: Opportunities and Challenges**. Washington, DC: World Bank.
- Timmer, C. P. (2015). *Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger is So Hard*. University of Pennsylvania Press.
- Pritchett, L., & Summers, L. H. (2014). *Asiaphoria Meets Regression to the Mean*. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 20573.
- OECD/FAO. (2023). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2023–2032*. Paris: OECD Publishing.
- Yusuf, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2012). "Mitigating Distributional Impact of Fuel Price Increase on Indonesian Households: The Role of Cash Transfers." *Energy Policy*, 40, 100–111.
- Nugroho, H., & Darwanto, D. H. (2021). "Peran Infrastruktur Pertanian dalam Meningkatkan Produksi Pangan Nasional." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Indonesia*, 9(1), 25–36.